

ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG RUMAH SAKIT PADA PASIEN RAWAT INAP PENGGUNA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR

WAHYUNI. 2018. Analisis Perputaran Piutang Rumah Sakit pada Pasien Rawat Inap Pengguna BPJS di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Chalid Imran Musa dan Abdi Akbar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perputaran piutang dan rata-rata periode penagihan piutang pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel penelitian ini adalah data keuangan tahunan 2015-2017 pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang memakai angka numeric (angka), yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil sebagai kesimpulan, dari data ini dianalisis menggunakan analisis rasio khususnya perputaran piutang dan rata-rata periode penagihan piutang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total perputaran piutang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar disetiap tahunnya mengalami penurunan, dapat dilihat pada tahun 2015 total perputaran piutang sebesar 8,94 kali, dan tahun 2016 total perputaran piutang sebesar 6,55 kali, serta total perputaran piutang tahun 2017 sebesar 3,37 kali, dan rata-rata periode penagihan piutang yang diukur menggunakan rasio rata-rata periode penagihan piutang dikatakan kurang baik, dalam hal ini dilihat pada tahun 2015 rata-rata periode penagihan piutang yaitu 40 hari, ditahun 2016 rata-rata periode penagihan piutang yaitu 55 hari dan rata-rata penagihan piutang pada tahun 2017 adalah 107 hari. Hasil ini dikatakan tidak efisien dikarenakan tidak mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Brigham dan Edhart yaitu 10-15 kali pertahun dan rata-rata periode penagihan piutang yaitu 36 hari. Penyebab tidak efisiennya perputaran piutang karena pengelolaan pemberkasan dokumen klaim yang belum diverifikasi oleh pihak BPJS tergolong lambat dan lamanya proses penagihan juga memberi dampak negatif terhadap pendapatan rumah sakit. Sebagai saran, rumah sakit harus lebih memperhatikan pengelolaan piutang BPJS serta memperhatikan kestabilan perputaran piutang dan penagihan piutang rumah sakit dan perlu adanya penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi piutang BPJS di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kata Kunci :Perputaran Piutang, Rata-rata Periode Penagihan Piutang

A. Latar Belakang Perkembangan ilmu, teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus mengikuti perkembangan yang ada. Organisasi pemerintah yang menyandang status Badan Layanan Umum merupakan organisasi yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari laba tetapi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan sehingga dapat dinilai keberhasilannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan Keuangan BLU telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005. Pergeseran pola pembiayaan kesehatan masyarakat pengguna jasa rumah sakit dari dibiayai sendiri pembiayaan melalui pihak ketiga dengan kemudahan dalam pelayanan administrasi pasien. Rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat juga harus mampu menerapkan manajemen yang baik termasuk mengevaluasi, menilai prestasi kerjanya sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik dan rumah sakit mampu menghadapi ketatnya persaingan. Rumah sakit tidak hanya memperoleh penerimaan dari pembayaran secara tunai tetapi juga dari pembayaran secara kredit atas jasa yang diberikan. Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki

diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000, Kepmendagri 2 Nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11), PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2003 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbarui lagi melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terdiri dari: laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu dari sekian Rumah Sakit milik Kemenkes Kota Makassar yang berbentuk RSU diurus oleh Kemenkes. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 1994 merupakan rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta merupakan salah satu rumah sakit yang menggunakan layanan BPJS. Hal ini, BPJS dikhususkan untuk pasien rawat inap dimana pasien diberikan pelayanan untuk bisa menikmati fasilitas rumah sakit yang telah disediakan. Kebanyakan pengguna BPJS akan dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo karena merupakan rumah sakit utama di Sulawesi Selatan dan merupakan pusat rujukan dari semua rumah sakit tipe C dan B di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sehingga pihak rumah sakit meluncurkan sistem rujukan terintegrasi. (Dr. dr Khalid Saleh SpPD-KKV FINASIM) 3 BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Manajer harus memiliki informasi yang lebih luas untuk mengetahui kondisi rumah sakit saat ini dan perkiraan dimasa yang akan datang. Penerimaan kredit terjadi ketika kas tidak diterima langsung oleh pasien yang telah selesai berobat dirumah sakit, melainkan pasien tersebut menggunakan kartu asuransi kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sehingga ada tenggang waktu tertentu untuk penerimaan kas. Pengelolaan manajemen keuangan yang baik perlu adanya perencanaan dan analisa yang dirancang dengan baik khususnya mengenai piutang rumah sakit. sehingga kebijakan manajemen piutang rumah sakit dapat berjalan dengan efisien dan efektif, baik mengenai prosedur piutang, penagihan piutang, penjualan kredit dan masalah piutang rumah sakit lainnya. Prosedur munculnya piutang disebabkan karena adanya pelayanan jasa yang disediakan oleh pihak rumah sakit teruntuk pasien. 4 Perputaran piutang merupakan hubungan antara penjualan kredit dan piutang usaha. Piutang dapat menjadi potensi bila dikelola dengan baik tetapi sebaliknya akan menjadi risiko kerugian bila tidak dikelola dengan baik. Risiko kerugian piutang rumah sakit dapat berupa risiko tidak dibayarnya sebagian atau keterlambatan pelunasan piutang oleh BPJS.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian analisis perputaran piutang pengguna BPJS pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Perputaran piutang

pengguna BPJS pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang diukur menggunakan rasio perputaran piutang dikatakan tidak efisien karena tidak mencapai standar perputaran piutang, hal ini terlihat pada tahun 2015 total perputaran piutang sebesar 8,94 kali, dan tahun 2016 total perputaran piutang sebesar 6,55 kali, serta total perputaran piutang tahun 2017 sebesar 3,37 kali. 2. Rata-rata periode penagihan piutang pengguna BPJS pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang diukur menggunakan rasio rata-rata periode penagihan piutang dikatakan kurang baik, dalam hal ini dilihat pada tahun 2015 rata-rata periode penagihan piutang yaitu 40 hari, ditahun 2016 rata-rata periode penagihan piutang yaitu 55 hari dan rata-rata penagihan piutang pada tahun 2017 adalah 107 har